

**LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK  
TAHUN ANGGARAN 2016/2017**



**AGAMA DAN MEDIA  
(DISKURSUS LGBT DALAM OPINI SKH REPUBLIKA)**

Oleh:

Dr. Suranto., M.Si., M.Pd.

Benni Setiawan., M.S.I.

Siti Machmiah., M.A.

Dyna Herlina S., M.Sc.

Salt Masitoh

Desy Nurjanah

**PENELITIAN INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SK DEKAN FIS UNY NOMOR : 71/UN34.14/KU/2016, TANGGAL 10 MEI 2016  
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
NOMOR : 1684q/UN34.14/LT/2016 TANGGAL 1 JUNI 2016**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENELITIAN KELOMPOK**

1. Judul Penelitian : AGAMA DAN MEDIA (DISKURSUS LGBT DALAM OPINI SKH REPUBLIKA)
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Dr. Suranto, MPd., M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 196103061987021004
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Jabatan Struktural : Ketua Jurusan
- f. Bidang Keahlian : Ilmu Komunikasi
- g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial / Ilmu Komunikasi
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
- i. Telepon rumah/ kantor / HP : 087839770219
3. Tim Peneliti :

No	Nama dan Gelar	NIP	Bidang Keahlian
1.	Benni Setiawan, M.S.I	198303292015041001	Agama dan Media
2.	Dyna Herlina S, M.Sc	198104212005012001	Ilmu Komunikasi/ KajianMedia
3.	Siti Machmiah, M.A	198805222015042002	Ilmu Komunikasi

4. Mahasiswa yang terlibat :

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Desy Nurjanah	14419144024	Ilmu Komunikasi
2.	Salt Masitoh	14419144010	Ilmu Komunikasi

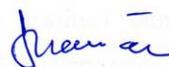
5. Pendanaan dan jangka waktu penelitian
- a. Jangka waktu Penelitian yang diusulkan : 23 Maret s/d 30 Oktober 2016
- b. Biaya total yang diusulkan : Rp 10.000.000,-
- c. Biaya yang disetujui : Rp 10.000.000,-

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. Suranto, M. Pd., M.Si.  
NIP 19610306 198702 1 004

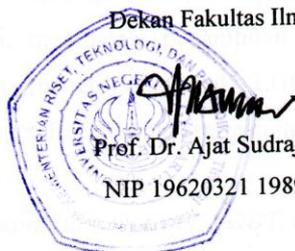
Yogyakarta, 30 Oktober 2016  
Ketua Tim Peneliti



Dr. Suranto, M. Pd., M.Si.  
NIP 19610306 198702 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.  
NIP 19620321 198903 1 001

## ABSTRAK

Media memainkan peran penting dalam memengaruhi cara pandang masyarakat melalui diskursus yang ditawarkan. SKH Republika menurunkan banyak tulisan mengenai isu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) selama kurun waktu 24 Januari – 31 Maret 2016. Pertanyaan penelitian yang diajukan : (1) bagaimana representasi ideologi ? (2) bagaimana representasi seksualitas dalam pemberitaan SKH Republika?

Metode Penelitian yang dipilih adalah analisis wacana Van Dijk dengan pendekatan intensional. Menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dengan metode analisis wacana Van Dijk. Menurut Van Dijk (2001: 352) analisis wacana kritis (CDA) adalah jenis penelitian wacana analitik yang terutama mengkaji tentang bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi dan ketidaksetaraan yang berlaku, direproduksi, dan dilawan dengan teks dan pembicaraan dalam konteks sosial politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum SKH Republika menawarkan wacana anti LGBT melalui pemilihan narasumber dan pendapat mereka yang dikutip. Representasi ideologi yang ditampilkan bahwa LGBT bersandar pada ideologi liberalisme dan universalisme yang bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum nasional Indonesia. Sedangkan wacana seksualitas direpresentasikan melalui kuasa pengetahuan dan institusi otoritatif. Kuasa pengetahuan yang dipilih adalah pengetahuan psikolog islam tentang seksualitas bahwa LGBT merupakan penyimpangan perilaku karena pergaulan sosial yang salah. Sedangkan institusi otoritatif yang berhak menentukan perilaku seksual adalah : institusi agama, negara dan pendidikan. Semua narasumber islam di tiga institusi tersebut menolak LGBT sedangkan narasumber negara non-islam bersifat moderat dengan membatasi penampilan mereka di ruang publik, selanjutnya peneliti sekuler menerima praktik LGBT sebagai salah satu jalan masuk membentuk pengetahuan dan kesetaraan hukum.

**Kata kunci : *Republika, wacana, LGBT, kuasa, seksualitas, pengetahuan***

## **KATA PENGANTAR**

Berkat Rahmat Allah SWT, Tim Penelitian Jurusan Ilmu Komunikasi telah menyelesaikan penelitian berjudul “Agama dan Media (Diskursus LGBT dalam Opini SKH Republika)” sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Program ini bertujuan mengetahui representasi ideologi dan seksualitas dalam pemberitaan SKH Republika.

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Tim Penelitian Jurusan Ilmu Komunikasi menyampaikan terima kasih pada berbagai pihak berikut ini.

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
2. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
3. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantuk pelaksanaan kegiatan PPM ini

Kegiatan Penelitian ini belum mencapai target yang ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu ditindaklanjuti dengan program lanjutan di masa yang akan datang. Meski demikian kami berharap kegiatan Penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Yogyakarta, 30 Oktober 2016

Tim Penelitian

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Urgensi Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. KERANGKA TEORI .....	6
1. Representasi .....	6
2. Media dan Representasi .....	6
3. Media dan Ideologi.....	7
4. Media dan Seksualitas .....	8
5. SKH Republika .....	8
B. Peta Jalan Penelitian.....	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	10
BAB IV DATA DAN ANALISIS .....	12
A. Representasi Ideologi.....	13
a. Ideologi Liberalisme vs Konservatif .....	13
b. Ideologi Nasionalisme .....	15
B. Representasi Seksualitas .....	17
1. Pengetahuan LGBT .....	18
2. Pihak Otoritatif.....	19
Kesimpulan .....	25
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .....	27
A. Anggaran Biaya .....	27
B. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	29
Lampiran - lampiran.....	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pro dan kontra lesbian, gay, biseks, dan transgender (LGBT), akhir Januari hingga pertengahan Maret menjadi perbincangan menarik. Media, baik televisi (elektronik) dan Koran (cetak) memuat berita terkait LGBT. Televisi pun seakan menemukan momentum untuk menaikkan rating dengan menayangkan dan menyajikan berita terkait LGBT. Sebuah stasiun televisi bahwa secara khusus mengangkat tema LGBT. Konon rating tayangan itu cukup tinggi.

Seakan tidak mau kalah dengan televisi, media cetak, dalam hal ini Koran juga menyajikan serangkaian berita terkait LGBT. Koran berskala nasional dan lokal pun berebut space (ruang) dalam menyajikan sejumlah berita.

Salah satunya adalah Harian Umum *Republika*. Bermula dari berita berjudul “LGBT Ancaman Serius”, terbit pada Ahad, 24 Januari 2016, Koran ini seakan menegaskan diri sebagai media yang menolak LGBT di Indonesia. Sikap tegas ini berbeda dengan media nasional besar seperti Kompas. Menurut Ignatius Haryanto, pada acara Klinik Hukum Media di Universitas Atmajaya, Sabtu, 19 Maret 2015, media yang didirikan oleh PK Oejong dan Jacob Oetama ini tidak menyatakan sikap terhadap LGBT.

Hal tersebut berbeda dengan *Republika*, dengan tegas menolak LGBT. Dalam berita itu, Republik menulis, seluruh “Seluruh elemen masyarakat perlu bergandeng tangan untuk mencegah berkembangnya gaya hidup lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. Para orang tua dan guru diingatkan untuk lebih peka terhadap perkembangan anak sebab gaya hidup LGBT sudah mulai mengancam anak-anak sejak dini” (*Republika*, Ahad, 24 Januari 2016: 1).

Selain berita itu, *Republika* juga menurunkan judul di halaman pertama, “Bentengi Anak dan Pemuda” (Ahad, 7 Februari 2016). “Ada Tekanan Asing Soal LGBT” (Selasa 16 Februari 2016). “Polisi Minta Pro-LGBT tak Kampanye” (Kamis, 18 Februari 2016). Bahkan, pada Kamis, 18 Februari, *Republika*

menurunkan berita *in dept* dengan judul Pro Kontra di halaman 8 dengan judul “UNDP Perkuat Komunitas LGBT” dan “Pemerintah Bantah Terima Dana”.

Dalam judul “ICMI Jangan Kucilkan LGBT” (Sabtu, 20 Februari 2016) termuat *Kapolri Menegaskan permintaan gerakan LGBT tak melakukan propaganda*. Sehari berikutnya, masih di halaman 1, *Republika* (Ahad 21 Februari 2016), kembali menurunkan berita, “LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa”, *semua pihak diminta membantu orang-orang LGBT untuk hidup lurus*.

Saat pembahasan LGBT menjadi berita utama (*headline*) sebuah media, maka akan muncul tanggapan dari masyarakat dalam bentuk artikel yang termuat dalam halaman “Opini”. Hal tersebut tergambar dalam sejumlah opini yang termuat dalam *Republika*. Setidaknya, setelah perbincangan LGBT muncul, *Republika* telah memuat sebanyak 15 artikel tentang LGBT. Semua artikel yang dimuat menolak wacana LGBT dalam berbagai perspektif. Seperti perspektif hak asasi manusia (HAM), ramah anak, agama dan moral, kedokteran (kejiwaan), bahkan dalam perspektif politik. Salah satunya tercermin dalam judul “Politik Perang Gerakan LGBT” (*Republika*, Sabtu, 13 Februari 2016: 7).

Sebagaimana di awal sudah dijelaskan, posisi *Republika* menolak wacana LGBT. Saat media ini sudah memosisikan diri, maka Opini yang diturunkan pun akhirnya sesuai dengan panangan umum redaksi, yaitu menolak wacana LGBT.

Salah satu Opini yang termuat memuat pernyataan “Perang wacana di Facebook dimenangkan oleh pro-LGBT. Sementara, perang di udara dimenangkan oleh anti- LGBT. Satu pihak dimudahkan untuk mengeklik *report* ke otoritas Facebook, pihak lainnya dimudahkan melapor ke situs web KPI. Di luar itu, sekali lagi, Facebook adalah bisnis. Dan, sebuah bisnis perlu mengambil hati konsumennya. Dalam hal ini, warga Indonesia pengguna Facebook yang jumlahnya 69 juta (menurut the Wall Street Journal, 2014) dan mayoritas tak setuju paham LGBT diumbar bebas ke publik. Kalau mau, seharusnya pemerintah bisa membicarakan persoalan ini bahwa tidak semestinya suara-suara anti-LGBT dibungkam di era kebebasan berpendapat seperti ini” (“Opini” *Republika*, Kamis, 3 Maret 2016: 2).

Opini yang ditulis oleh Brahmanto Anindito itu mewakili sikap redaksi yang kontra LGBT. Melalui opini itu, menunjukkan bahwa LGBT tidak sekadar

sebuah pertarungan wacana di ruang publik. Namun, menyangkut bisnis konglomerasi besar, yang dalam hal itu diwakili oleh Facebook.

Pertarungan wacana seakan membenarkan apa yang disebut oleh Fairclough. Fairclough (1989) dalam perspektif teori *discourse* dan ideologi, bahwa *discourse* media kental berbalut kepentingan dan ideologi. Hal tersebut paralel dengan pendapat Althusser (1984) yang mengatakan bahwa media adalah bagian dari *ideological state apparatus*.

Sebagai sebuah “pengemban” ideologi tertentu, media memainkan peran ganti. Yaitu, sebagai penyebar berita berdasarkan prinsip-prinsip jurnalisme dan juga sebagai media pengembang ideologi yang diyakini oleh pemilik media.

Kajian ini tentu menarik untuk diteliti. Peralnya, media sebagai salah satu pilar demokrasi kini terfragmentasi dalam kelompok-kelompok kepentingan. Masukkan pemilik media ke gelang politik menjadikan “ideologi” media seakan terus menggempur alam bawah sadar masyarakat untuk menyatakan pendapat dan bersikap terhadap sebuah pokok masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumukan pertanyaan penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana representasi ideologi yang ditampilkan oleh SKH Republika dalam publikasi mengenai LGBT?
2. Bagaimana representasi seksualitas yang ditampilkan oleh SKH Republika dalam publikasi mengenai LGBT?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menemukan wacana ideologi yang direpresentasikan oleh SKH Republika
2. Menemukan wacana seksualitas yang direpresentasikan oleh SKH Republika

#### **D. Urgensi Penelitian**

Wacana LGBT dalam konstruksi masyarakat ketimuran menjadi perbincangan dan praktik yang tabu. Namun, dikarenakan derasnya arus informasi dan teknologi, memungkinkan pandangan itu akan berubah. Perubahan sikap ini tentu perlu dipahami dalam bingkai falsafah kebangsaan, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sebagai sebuah nilai luhur, falsafah kebangsaan menjadi sebuah payung hukum sekaligus norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Media sebagai salah satu pilar kehidupan masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga “kedaulatan” bangsa, dalam hal ini membentengi diri dari perbuatan yang “menyimpang”. Media dalam bentuk dan ragam ideologi pun akan menjadi corong bagi kemaslahatan bersama. Ragam media itulah sebagai bagian dari potret kebangsaan yang menjadi arti penting “kebebasan” dan “kemerdekaan” yang bertanggung jawab.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kemudian media memainkan peran itu? Bagaimana kemudian media mengkonstruksi gagasan yang bersambut dengan pandangan masyarakat yang termuat dalam rubrik opini. Sebagai ruang ekspresi, rubrik opini media massa juga menjadi cerminan pendapat masyarakat yang tentu tak akan lepas dari pengaruh ideologi media massa.

Beberapa pertanyaan tersebut mendesak untuk dijawab dalam bingkai kemanusiaan yang beradab. Penelitian ini hendak melihat serangkaian opini di Harian Umum *Republika*, yang mana, media ini telah memosisikan diri sebagai pihak kontrak LGBT. Hal ini cukup penting untuk memotret sejauh mana masyarakat memahami wacana LGBT. Lebih dari itu, suara masyarakat yang terangkum dalam rubrik opini menjadi semacam pendulum pertarungan wacana itu menarik untuk diperhatikan.

Penelitian ini diharapkan mampu membaca dan memetakan wacana LGBT yang telah menjadi wacana umum masyarakat. LGBT sebagai sebuah wacana dan tindakan perlu dibingkai dan dipahami dalam konteks keindonesiaan. Bangunan pemikiran masyarakat yang tertuang dalam opini di media massa dilihat sebagai suara publik. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam proses pemahaman makna keindonesiaan, atau dalam bahasa Universitas Negeri

Yogyakarta sebagai takwa, mandiri, cendekian (taman cendekia). Meneguhkan keindonesiaan berarti juga sedang menjalankan amanat kemanusiaan yang mulia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KERANGKA TEORI**

##### **1. Representasi**

Representasi adalah produksi pemaknaan mengenai konsep yang ada di pikiran kita melalui bahasa. Representasi adalah kaitan antara konsep dan bahasa yang membuat kita dapat mengacu pada dunia nyata dari obyek, orang atau kejadian atau bahkan dunia imajinasi tentang obyek, orang dan kejadian (Hall, 1997: 17).

Bahasa merepresentasikan ‘dunia’ melalui tiga pendekatan yaitu reflektif, intensional dan konstruktif. Pendekatan reflektif menyebutkan bahwa makna itu terletak pada obyek, orang, ide dan kejadian tentang dunia nyata. Dalam hal ini bahasa bertindak sebagai cermin yang merefleksikan makna sebenarnya yang telah ada di dunia. Penutur bahasa hanyalah merefleksikan atau kenyataan yang ada bentuknya di dunia ini. Pendekatan ini seringkali juga disebut pendekatan mimetik.

Pendekatan intensional bekerja sebaliknya dengan pendekatan refleksi. Bahasa dalam pendekatan ini digunakan oleh penuturnya untuk menyampaikan pemaknaannya tentang dunia. Penutur memiliki intensi/niat untuk menyampaikan atau mengkomunikasi tentang suatu kenyataan berdasarkan tafsirannya dengan menggunakan aturan, kode dan kovensi bahasa yang dipahami oleh lawan bicaranya/pembaca.

Pendekatan ketiga, konstruktif, menganggap bahwa bahasa memiliki karakter sosial oleh karena itu pemaknaan atas bahasa ditentukan oleh para pihak yang berpartisipasi dalam komunikasi. Aktor sosial yang menggunakan sistem konseptual dalam budaya dan bahasanya lah atau sistem representasi lain yang membentuk pemaknaan (Hall, 1997: 24-25).

##### **2. Media dan Representasi**

Media, lewat mesin representasi, menyebarkan ideologi dengan mengartikulasi pemaknaan kelompok dominan yang dibungkus dalam sebuah

*discourse*. Berbeda dengan kalangan Marxis klasik, Gramsci (1971) melihat media laksana pasar: tempat berbagai kepentingan saling dinegosiasikan. Sebagai pasar, media tentu tak melulu hanya menyalurkan kepentingan kelompok dominan, tapi juga tempat seluruh ideologi saling berebut dan berkompetisi, saling menghegemoni (Edkin dan William, 2009).

Bagi Gramsci, media adalah arena kekuasaan (*field of power*), sebagai ruang dimana berbagai ideologi direpresentasikan. Sebagai arena, media menjadi wilayah terbuka dari berbagai kepentingan ideologis yang saling berkompetisi (Gramsci, 1971. Sobur, 2012: 30. Muhammad Fahmi, Irwan Abdullah, Ratna Noviani, Wening Udasmoro, 2015:58).

Pandangan teori kritis ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa media bukanlah entitas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh kelompok dominan. Media memiliki kemungkinan besar dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan.

Bagi teori kritis, teori selalu diasumsikan memiliki nilai emansipatoris karena ia bersifat kritis dan curiga terhadap masyarakat, sistem organisasi sosial, sistem kepercayaan dan seterusnya. Semua ini dicurigai sebagai sesuatu yang irrasional yang menempatkan individu di bawah pengaruh dominasi faktor sosial tertentu yang bisa jadi tidak disadari individu itu sendiri. Teori kritis lalu berusaha menolong dan menjadikan masyarakat agar lebih rasional dan mampu keluar dari belenggu irrasionalitas zamannya (Bambang A. Sipayung: 2009: 41).

### **3. Media dan Ideologi**

Sebuah karya tulis, termasuk teks media, pada umumnya merupakan respon terhadap situasi yang dihadapi oleh penulis dalam ruang dan waktu tertentu. Akibatnya, seorang pembaca mungkin akan salah paham jika ia tidak memperhatikan sisi psikologis dan status sosial pengarangnya (wartawan), sebab pengarang adalah orang yang selalu membawa muatan yang tak terelakan dan alamiah sebagai bagian dari kondisi dirinya sebagai manusia (Farid Esack, 1997: 50). Karena itu, seorang pembaca harus berprasangka sebelum membaca teks ini, disebabkan karena setiap orang membawa teks yang menjawab pertanyaan dan harapannya sendiri, oleh karena itu setiap pembaca perlu memahami latar

belakang subyektifitas penulis tanpa mempedulikan mengapa subyektifitas itu terbentuk (Farid Esack, 1997: 51).

Memahami sebuah teks media, seseorang dituntut untuk berusaha memahami pribadi seorang pengarang (dalam hal ini ideologi media).Tuntutan tersebut karena sebuah teks bisa saja menipu pembacanya ketika pembaca tidak mengenal lebih jauh siapa pengarangnya (Ilyas Supena, 2012: 167-169).

Dengan demikian, teks yang tersusun dalam opini media massa perlu juga dilihat sebagai sebuah “karya ideologi”. Pasalnya setiap orang mempunyai cara pandang dan sikap dan mengurai sebuah permasalahan. Teks dengan demikian tidak tunggal (monolitik).Ia memiliki banyak wajah. Sehingga pengkajian terhadap teks memerlukan seperangkat alat bantu agar mampu menangkap pesan sang penulis (*author*).

#### **4. Media dan Seksualitas**

Foucault berpendapat bahwa kita hanya akan memiliki pengetahuan jika hal-hal dianggap memiliki makna. Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa subyek seperti ‘kegilaan’, ‘hukuman’ dan ‘seksualitas’ hanya hadir bermakna dalam wacana mengenai hal itu (Hall, 1997: 46).

Media adalah medium untuk menampilkan wacana pengetahuan tentang seksualitas. Sehingga ketika membicarakannya, media tidak akan dapat terhindar dari beberapa hal berikut ini (Hall, 1997: 213-214).

- a. Menampilkan pengetahuan tertentu
- b. Aturan tentang bagaimana cara membicarakannya
- c. Subyek tertentu yang dibicarakannya
- d. Pihak yang memiliki otoritas untuk membicarakannya
- e. Institusi yang berhak mengatur dan mengorganisir subyek
- f. Pembicaran secara historis untuk menemukan regulasi praktik sosial yang baru.

#### **5. SKH Republika**

Menilik sejarah *Republika*, ia lahir sebagai respon atas revivalisme Islam. Republika berdiri pada tanggal 4 Januari 1993, surat kabar pertama bagi

komunitas Muslim di Indonesia ([http://www.mahakamedia.com/about\\_us](http://www.mahakamedia.com/about_us)).

Pendirian surat kabar ini banyak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor agama yang kental. Terbitnya harian ini adalah puncak dari kebangkitan pers Islam yang sejak era Orde Baru terus ditekan dan didepolitisir. Paskakemerdekaan umat Muslim Indonesia memang memiliki berbagai harian yang cukup berpengaruh, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu seluruh harian tersebut lenyap karena tekanan pemerintah, baik Orde Lama maupun Orde Baru.

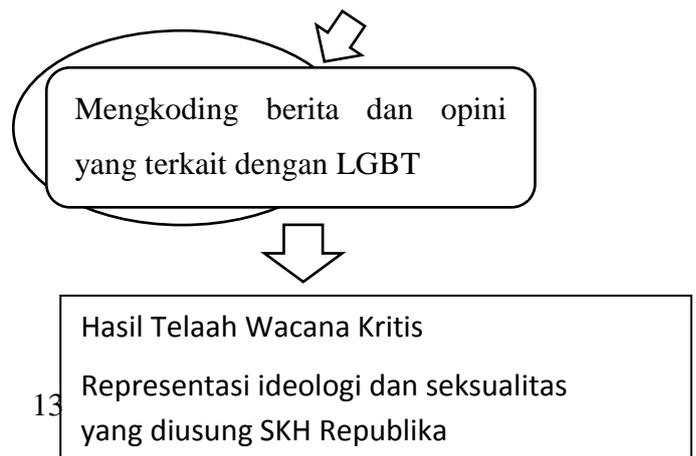
Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa mayoritas saham PT Abdi Bangsa kini dikelola oleh Mahaka Media adalah tokoh ICMI, organisasi yang di nilai sangat terkait dengan revivalisme Islam. David T. Hill dan Krisna Sen (1995) menyebut *Republika* dibangun setelah ICMI mengidentifikasi musuh bersama, yaitu kelompok minoritas yang menguasai konglomerasi media yang dengan sengaja menutup-nutupi kegiatan Islam secara profesional.

Mengingat hal tersebut, menjadi sangat wajar saat *Republika* menjadi “corong” Islam dalam mengelola berita. Berita—dalam hal ini opini—yang dimuat pun mencerminkan sikap dan kaidah dalam Islam.

Penelusuran Harian Umum *Republika* yang terbit pada tanggal 24 Januari-31 Maret 2016  
Kliping/memotong berita dan opini yang terkait



## B. Peta Jalan Penelitian



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan analisis wacana krisis (*critical discourse analysis*) dengan metode analisis wacana Van Dijk. Menurut Van Dijk (2001: 352) analisis wacana kritis (CDA) adalah jenis penelitian wacana analitik yang terutama mengkaji tentang cara bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidaksetaraan yang berlaku, direproduksi, dan dilawan dengan teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik. Dengan penelitian ini, analisis wacana kritis mengambil posisi eksplisit, dan dengan demikian ingin memahami, mengekspos, dan akhirnya melawan ketimpangan sosial.

Menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Pendekatan ini lazim disebut kognisi sosial digunakan untuk membantu memetakan bagaimana produksi teks yang melibatkan proses yang kompleks tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan (Eriyanto, 2001; 223).

Wacana oleh van Dijk digambarkan memiliki tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, konteks sosial. Inti dari analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis (Eriyanto, 2001: 224) sebagaimana digambarkan berikut.



Sumber: (Eriyanto, 2001: 225)

Tahapan analisis wacana yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap sebagai berikut (Eriyanto, 2001: 225-227).

1. Teks: dibagi menjadi tiga bagian yang saling mendukung. Pertama, struktur makro yaitu makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari

topik/tema yang diangkat dari suatu teks. Kedua, superstruktur yaitu kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan. Hal yang diamati adalah skematik yaitu bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh. Elemen yang diperhatikan adalah skema. Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks dari kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, paraphrase dan gambar. Hal yang diamati adalah sematik aspek yaitu makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Elemen yang diamati latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi.

2. Kognisi sosial: proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan.
3. Analisis sosial: menganalisa kondisi sosial yang mendasari kemunculan suatu teks dan dampak pemberitaan tersebut terhadap masyarakat. Struktur yang diamati adalah struktur makro. Hal yang diamati adalah tema/topik/tematik yang dikedepankan dalam suatu berita. Elemen yang diamati adalah topik. Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks, ini dapat pula disebut gagasan inti, ringkasan atau hal utama dalam teks.

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS**

Studi pendahuluan telah dilakukan melalui pengumpulan berita dan opini yang termuat dalam SKH *Republika* yang terbit pada 24 Januari hingga 31 Maret 2016. Selama rentang waktu tersebut ditemukan 29 artikel terdiri dari 16 artikel opini dan 12 artikel reportase mengenai LGBT yang dipublikasikan oleh SKH *Republika*. Jumlah ini tentu cukup banyak dalam rentang waktu kurang lebih dua bulan. Pemuatan yang banyak ini pun menjadi sebuah penanda, bahwa SKH *Republika* sangat memberi perhatian pada isu LGBT.

Berdasarkan jumlah publikasi tersebut ada 70 narasumber yang digunakan baik sebagai penulis artikel maupun narasumber reportase. Dari sejumlah itu 16 narasumber berafiliasi dengan organisasi islam non pemerintah, 32 narasumber dari organisasi pemerintah, 1 pakar hukum, 3 peneliti, 6 ahli medis, 1 tokoh agama selain islam, 6 aktivis organisasi kemasyarakatan, 1 orang pengamat sosial dan 1 artikel tanpa narasumber.

Dari 70 narasumber yang dapat diidentifikasi 5 menyatakan pro terhadap LGBT, 10 bernegosiasi dan sisanya yaitu 55 narasumber anti terhadap LGBT. Jumlah ini menunjukkan bahwa secara SKH *Republika* mengarusutamakan penolakan terhadap LGBT.

Sedangkan perspektif yang digunakan dalam pembahasan LGBT sangat bervariasi sebagai berikut: agama, hukum, kesehatan, anak/remaja/perempuan, keluarga, pemerintah, sosial budaya, teknologi komunikasi, pendidikan/keilmuan, moral dan HAM. Sehingga dapat dikatakan SKH *Republika* mengulas topik LGBT dari berbagai sudut pandang.

Berdasarkan hasil identifikasi tema, ada dua tema besar yang disampaikan yaitu soal ideologi dan seksualitas. SKH *Republika* dengan sengaja melakukan serangkaian pemilihan penulis dalam kolom opini dan narasumber dalam kolom pemberitaan yang secara konsisten menyampaikan suatu gagasan serupa yang serupa mengenai ideologi dan seksualitas. Para aktor itu membahas ideologi dari berbagai sudut pandang yaitu islam dan nasionalisme. Sedangkan pembahasan mengenai seksualitas dimasukkan dalam diskursus kesehatan, hukum, islam, dan sejarah. Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu: representasi ideologi dan

representasi seksualitas.

## **A. Representasi Ideologi**

### **a. Ideologi Liberalisme vs Konservatif**

Dalam tulisannya mengenai LGBT, SKH Republika serigkali mengguakan istilah “liberal” untuk menunjukkan kecenderungan ideologis para pelaku LGBT. Kaum liberal, menurut para ahli yang menulis opini menghormati hak individu oleh karena itu cenderung yang berbeda seperti homoseksualitas juga dihargai. Sebagaimana disampaikan berikut ini.

*Bahrn Mubarok, Kandidat Doktor Psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Dai Ambassador Dompot Dhuafa, Sedang Menulis Disertasi Tentang LGBT*  
“Bagi kaum liberal, perilaku homoseksual adalah bukan mental illness, melainkan bagian dari hak setiap individu yang harus dihormati. Justru yang dianggap patologi oleh mereka saat ini adalah pandangan bahwa manusia semestinya heteroseksual.”

*Hasian Sidabutar, Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Alumnus Universitas Negeri Medan*  
“Tidak dapat dimungkiri maraknya fenomena LGBT sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi penyandang LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian life style masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang.”

Bagi kedua di atas, kelompok liberal justru menganggap perilaku heteroseksual sebagai tindakan yang konservatif dan patologis. Pada titik ini, para penulis mempertentangkan ideologi liberal dengan konservatif; dan ideologi liberal dengan patologi (penyakit). Ketiga kata kunci tersebut menunjukkan definisi para penulis mengenai liberal yaitu bukan konservatif dan bukan penyakit.

Penulis yang lain juga menggunakan istilah liberal untuk menjelaskan perilaku seksualitas sebagaimana berikut.

*Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait*  
“Saat ini remaja di Indonesia sudah sangat liberal. Mereka sudah berani berciuman saat pacaran. Bahkan saat saya tanya apakah ada yang tak pernah lihat film porno, mereka tidak ada yang berani tunjuk tangan.”  
*Merujuk pada fenomena tersebut, jelas Arist, kalau gerakan LGBT didukung dan*

*dilegalkan, anak-anak muda akan semakin liberal lagi dalam hal pemahaman seksualitas. Makanya jangan sampai LGBT ini didukung dan dilegalkan, katanya.*

Narasumber dalam berita itu, menyamakan kecenderungan seksual LGBT dengan gaya pacaran yang mengarah pada hubungan seksual, keduanya adalah kecenderungan liberal. Kata “liberal” mengacu pada perilaku yang bebas secara seksual. Liberal disamakan dengan kebebasan seks.

Istilah “liberal” juga dikaitkan dengan arah ilmu pengetahuan sebagaimana disampaikan oleh dua penulis kolom opini berikut.

*Bahrn Mubarak, Kandidat Doktor Psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Dai Ambassador Dompot Dhuafa, Sedang Menulis Disertasi Tentang LGBT*  
*Sejujurnya, penulis banyak belajar dan sering mengutip hasil-hasil riset yang mereka lakukan. Penulis hanya ingin mengungkapkan bahwa literatur tentang LGBT masih lebih didominasi hasil-hasil penelitian para peneliti yang berideologi liberal, bahkan aktivis gerakan LGBT. Ada kesan penolakan terhadap LGBT tidak memiliki landasan ilmiah.*

*H. Fahmi Salim, Lc, M.A, Lulusan S-2 Ilmu Tafsir, Universitas al-Azhar Kairo*  
*Tujuannya liberalisasi kisah Luth adalah satu, yaitu membiarkan dan melegalkan perkawinan sejenis atau perkawinan homoseksual. Dibatalkan analisis, seolah-olah, umat Nabi Luth bukan diazab sebab mereka homoseks, tapi karena mereka mengingkari kerasulan dan tidak sopan pada para tamunya. Karena itu, perilaku homoseksual boleh-boleh saja. Sejatinya, tafsir demikian pada kisah Luth bahkan sudah lama menjadi narasi yang digaungkan di penyuluhan yang mengampunahkan hak seksual kaum LGBT dengan topeng edukasi HIV/AIDS.*

Pembahasan penelitian LGBT dan tafsir Al-Qur'an digunakan untuk mendudukan pengetahuan ideologi liberal. Menurut Bahrn Mubarak, para peneliti tentang LGBT mendasarkan penelitiannya dalam sudut pandang liberal, sedangkan H. Fahmi Salim menempatkan liberal sebagai salah satu metode tafsir umat Nabi Luth.

Representasi ideologi digunakan SKH Republika untuk menjelaskan LGBT adalah ideologi liberal. “Liberal” diartikan bukan konservatif, bukan patologi, perilaku seksual bebas dan sudut pandang pengetahuan.

Ideologi liberalisme seringkali digunakan sebagai wacana untuk memberi perhatian terhadap seks dan orientasi seksual ini berada di belakang keterusterangan dan sikap para LGBT untuk menunjukkan dirinya (*coming out*)

dan menurunkan minat untuk berubah dan mencari bantuan untuk memperbaiki abnormalitas ini. Melalui konsep liberalisme dan hak asasi manusia, masyarakat diminta untuk menerima abnormalitas sebagai bagian dari seksualitas manusia dan organisasi dan aktivis juga membantu mempromosikan ideologi ini atas nama kebebasan (Owoyemi dan Sabri, 2013:110).

Dalam hal ini wacana yang dikembangkan SKH Republika mengidentikan LGBT dengan liberal sesuatu yang seringkali digunakan oleh media lain sebagaimana dijelaskan oleh Owoyemi dan Sabri (2013).

Jika ditelaah lebih lanjut, liberalisme sebenarnya tidak sesederhana kebebasan individu. Ideologi ini memiliki setidaknya tiga lapisan yaitu : emansipasi, kesetaraan dan agama.

Pada ranah emansipasi, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berpartisipasi politik dan hukum. Setiap individu setara di depan hukum dan politik. Pada soal kesetaraan, liberalisme mendorong setiap orang memiliki hubungan yang setara di depan hukum. Terakhir, dalam hal agama liberalisme memisahkan hubungan antara rumah ibadah dan negara dengan menempatkan agama sebagai urusan pribadi sedangkan urusan negara di ruang publik ( Alexander, 2014:6 ).

Jika kita menggunakan definisi liberalisme di atas maka ada beberapa pendapat para narasumber di SKH Rebulika yang kurang tepat. Liberalisme memang bisa diartikan sebagai kebebasan individu untuk menentukan hal-hal privat seperti agama dan seksualitas namun kebebasan itu dibatasi oleh hak politik dan hak hukum orang lain. Sehingga jika menempatkan LGBT sebagai kelompok yang bebas tanpa syarat dengan menyingkirkan kelompok lain seperti heteroseksual; bukanlah pepadanan diskursus yang tepat.

#### **b. Ideologi Nasionalisme**

Selain liberalisme, ideologi lain yang digunakan sebagai retorika oleh penulis SKH Republika adalah nasionalisme yang dipertentangkan dengan nilai universalisme. Menurut para penulis, aktivis LGBT bertopeng dibalik Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai universal dunia, namun dalam beberapa hal nilai-nilai tersebut justru bertentangan dengan nilai nasionalisme Indonesia.

Pendapat tersebut dapat dipahami dari beberapa pernyataan berikut ini.

*Maneger Nasution, Komisioner Komnas HAM, Perspektif HAM dalam Pernikahan Sesama Jenis*

*Pasal-pasal dalam DUHAM itu ada yang ketat, ada pula yang longgar. Contoh, Pasal 16 DUHAM tentang hak untuk menikah dan berkeluarga. Dalam pasal itu, tidak ada indikasi dibolehkannya pernikahan sejenis. Oleh karena beberapa sifatnya yang longgar, negara pihak menolak, seperti Indonesia, tidak secara otomatis seluruhnya mengikuti isi setiap setiap pasal dari DUHAM PBB, walaupun Indonesia telah meratifikasi DUHAM PBB. Semua isi pasal harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi Indonesia.*

*Perangkat hukum yang paling mengikat adalah hukum nasional. Untuk isu di wilayah abu-abu (belum ada kesepakatan universal tentangnya) yang digunakan adalah hukum nasional. Contoh, pasal 16 tentang hak untuk menikah dan berkeluarga yang berhubungan dengan isu pernikahan sesama jenis sampai saat ini masih termasuk wilayah abu-abu DUHAM PBB.*

*Jazuli Juwaini (PKS)*

*"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

*Hepi Wahyuningsih*

*Ahli Psikologi Keluarga Universitas Islam Indonesia (UII)*

*Di samping itu, dukungan dari pihak luar dan beberapa perusahaan multinasional yang terus mengalir juga turut memperkuat perjuangan mereka. Tentu sebagai orang tua yang masih memegang nilai-nilai luhur bangsa, kita tidak bisa tinggal diam membiarkan anak-anak kita dipengaruhi oleh gerakan LGBT. Lalu, apa yang harus kita lakukan?*

*Intan Mahabah Nabila, Mahasiswa Fakultas Hukum UI, Relawan pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI*

*Indonesia pun sebagai negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri sudah jelas tertera di Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Para penulis tersebut mengakui bahwa Indonesia merupakan bagian dari warga dunia yang meratifikasi Hak Asasi Manusia melalui keikutsertaan dalam Persatuan Bangsa-Bangsa. Hukum universal itu mengakui hak setiap identitas seseorang termasuk di dalamnya adalah identitas seksual.

Meskipun demikian, ada dua argumen yang membuat para penulis menolak universalisme identitas seksual. Pertama, pengaturan detail mengenai hal itu belum diatur. Kedua, menurut para penulis hukum yang lebih mengikat adalah hukum nasional yang dengan jelas menyebutkan bahwa ada 2 orientasi seksual yaitu perempuan dan laki-laki mengikuti UU Perkawinan.

Diskursus mengenai hal itu juga dijelaskan oleh Altman D(2001): masalah utama berkaitan dengan globalisasi definisi homoseksual adalah generalisasi. Identitas adalah konstruksi sosial, sebuah mitos, yang dibentuk berkaitan dengan sejarah, budaya dan karakter yang dibagi. Budaya dan sejarah kelompok homoseksual di seluruh dunia tidaklah sama. Ada banyak budaya dan sejarah yang membuat penerimaan homoseksual yang tidak berlaku universal.

Secara intensional, redaksi SKH Republika menyusun argumen, melalui para narasumber, bahwa dalam kasus Indonesia, ada hukum nasional, nilai nasionalisme, untuk menentang penerimaan universal terhadap praktik LGBT. Pemenuhan hak universal dibatasi oleh hukum nasional yang mengikat setiap warga negaranya.

Argumen nasionalisme sepenuhnya dapat diterima karena memang warga negara Indonesia terikat dengan aturan hukum nasional sebagaimana disampaikan oleh para penulis diatas. Namun, disisi lain berdasarkan Human Right Watch World Report 2013 ditemukan bahwa budaya/lokalitas/nasionalisme seringkali justru menciptakan diskriminasi HAM terhadap pelaku LGBT. Kemungkinan hukum nasional membatasi atau bahkan meniadakan HAM pelaku LGBT absen dari pembahasan SKH Republika (<https://www.hrw.org/world-report/2013>).

## **B. Representasi Seksualitas**

Selain diskursus ideologi, wacana lain yang muncul dalam publikasi SKH Republika mengenai LGBT adalah seksualitas. Isu ini tentu saja tidak dapat dihindarkan ketika membicarakan orientasi seksual. Mengikuti analisis Foucault tentang seksualitas, bagian ini akan mengupas topik-topik yang digunakan para narasumber untuk membahas seksualitas.

## 1. Pengetahuan LGBT

Perbincangan tentang LGBT membawa pengetahuan baru mengenai orientasi seksual non heteroseksual. Ada banyak pengetahuan mengenai hal ini yang telah ditelaah berdasarkan sudut pandang ilmu kesehatan jiwa dan fisik. Redaksi SKH Republika secara intensional memilihkan beberapa pengetahuan tersebut untuk pembacanya seperti dibawah ini.

*Ihsan Gumilar, Peneliti Psikologi Saraf ( Neuropsychology), Struktur Otak LGBT Adanya konsep neuroplasticity ini menyampaikan bahwa perbedaan struktur otak tidak serta merta menyebabkan seseorang mempunyai orientasi seksual LGBT. Akan tetapi, kebiasaan, pengalaman, dan gaya hidup yang dibangunlah yang bisa mengubah struktur dan fungsi otak, sehingga menghasilkan orientasi dan perasaan intim terhadap sesama jenis. LGBT merupakan penyakit psikologi yang sangat berpotensi mendatangkan penyakit-penyakit lainnya.*

*Prof Subandi, Asosiasi Psikologi Islam, Himpunan Psikologi Indonesia (API-Himpisi), LGBT Berhak mendapat Layanan Kesehatan Jiwa  
"Temuan ilmiah terkini menunjukkan bahwa perilaku LGBT dipengaruhi oleh lingkungan dan orientasi seksual bersifat cair yang memungkinkan perilaku ini dapat di ubah."*

*Aliah BP Hasan, Bidang Kajian Ilmiah Asosiasi Psikologi Islam  
Perilaku homoseksual bukan hasil pengaruh genetika karena mereka yang homoseksual tidak dapat meneruskan gennya kepada keturunannya. Faktor nongenetiklah yang menyebabkan gen organisme mengekspresikan dirinya secara berbeda.  
Secara ringkas, berbagai penelitian menunjukkan bagaimana kecairan identitas, perilaku, dan orientasi seksual. Pertama, heteroseksual hingga kini merupakan identitas orientasi seksual terbanyak dan paling tidak banyak berubah sepanjang waktu (Kinnish, Strassberg, & Turner, 2005).*

Diskursus orientasi seksual tersebut dikaitkan dengan pembentukan identitas seksual yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial bukan bawaan genetik. Atas argumen itu, para penulis di atas menyatakan bahwa perubahan orientasi seksual yang natural yaitu dari heteroseksual menjadi homoseksual merupakan akibat interaksi lingkungan yang salah. Berdasarkan argumen yang sama, maka mereka berpendapat bahwa perilaku LGBT dapat disembuhkan jika mendapatkan stimulus lingkungan yang baik.

Lebih jauh lagi, redaksi menyebutkan bahwa perilaku LGBT merupakan

penderita kesehatan jiwa yang perlu mendapatkan pertolongan medis sebagai hak penderita gangguan jiwa. Pertolongan medis yang diperlukan adalah konsultasi dan pendampingan dari psikolog. Selanjutnya adalah bimbingan spiritual. Pendapat tersebut dalam kutipan berikut.

*Dr Danardi Sosrosumihardjo SpKJ(K), Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI), LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa*

*"Orang dengan homo – seksual, yakni gay, dan lesbian, serta biseksual masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Sedangkan, transeksualisme dinyatakan masuk dalam kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). PDSKJI mendukung upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi ODMK dan ODGJ melalui upaya kesehatan jiwa dengan memberi pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hak asasi manusia (HAM),"*

*Subandi, Asosiasi Psikolog Islam*

*LGBT merupakan suatu penyakit psikologis yang perlu ditangani. Dalam menangani kasus psikologis bagi para LGBT perlu adanya pendampingan, bukan hanya pendampingan psikologis semata namun perlu pendampingan secara spiritual dan rohaniah. Dalam perspektif psikologi Islam sebuah transformasi kehidupan menjadi lebih baik jika ada sebuah penyesalan yang nantinya akan membawa seseorang untuk taubat dan kembali ke jalan Allah SWT.*

Michael Foucault (1977) menjelaskan bahwa pembentukan pengetahuan adalah praktik kekuasaan. Pihak yang berkuasa dalam hal ini adalah psikolog islam dan redaksi SKH Republika membentuk pengetahuan baru mengenai LGBT yang seturut dengan ideologi mereka yaitu menolak praktik LGBT.

## **2. Pihak Otoritatif**

Dalam pembahasan mengenai seksualitas, menurut Foucoult, selalu saja melibatkan pihak-pihak yang dianggap berwenang membicarakannya. Dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi setidaknya 3 pihak yaitu: institusi agama, negara, dan pendidikan. Satu persatu akan dibahas berikut ini.

### **a. Institusi Agama**

Berdasarkan institusi agama yang memberikan argumennya di ruang pemberitaan SKH Republika, hanya ada satu orang yang mewakili institusi agama non Islam, sedangkan sisanya didominasi oleh pemimpin agama Islam. Hal ini tentu saja selaras dengan kecenderungan SKH Republika yang

didirikan oleh kelompok Islam. Beberapa pernyataan narasumber yang mewakili institusi agama sebagai berikut.

*Romo Paulus Christian Siswantoko, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Agama Tolak LGBT*

*“Aktivitas LGBT bertentangan dengan ajaran Katolik. Ia menolak keras apabila komunitas LGBT menuntut untuk dilegalkan”.*

*Ustadz Erick Yusuf, Tokoh Agama, LGBT Ancaman Serius*

*“Semestinya orang-orang yang mempunyai orientasi seks yang salah tersebut diberi penyuluhan. Baik lewat agama maupun lewat kejiwaan dengan intensif,”*

*Nazamudin Ramli, MUI, Majelis Agama Tolak LGBT*

*“Aktivitas LGBT sudah sangat meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap tatanan sosial bangsa Indonesia,”*

*“Waspada pula gerakan atau intervensi dari pihak mana pun yang beralih HAM dan demokrasi untuk mendukung perkembangan LGBT,”*

*Kokoh Hadapi Pengaruh Negatif, Fuad Nashori, Dewan Pakar Asosiasi Psikologi Islam*

*“Homoseksual yang awalnya tabu menjadi semakin bisa diterima ketika banyak orang yang mempropagandakan dengan masif. Adanya gerakan dari negara lain yang mendukung gerakan tuntutan kesetaraan para LGBT membahayakan anak-anak. Kekuatan yang paling ampuh melawan LGBT yakni iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena jelas di Alqur’an bahwa homoseksual dilarang. Selain itu, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar (pertemanan sosial) juga memiliki pengaruh yang penting untuk melindungi diri dari pengaruh LGBT.”*

Semua pemimpin Islam yang dikutip di atas memberikan satu pandangan yang sama mengenai praktik LGBT. Mereka semua menolak karena LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur’an. Meskipun ada kelompok yang memberikan tafsiran baru untuk kisah Kaum Nabi Luth yang mempraktikkan homoseksual namun tafsir baru itu dengan tegas ditolak.

Soal lain yang muncul dalam wacana LGBT dalam pandangan pemimpin Islam adalah pendekatan agama dapat menjadi solusi bagi para pelaku LGBT untuk keluar dari lingkungan yang menyesatkan mereka. HAM dan demokrasi dianggap sebagai dalih kelompok LGBT untuk melupakan aturan agama.

Di semua artikel yang menempatkan para pemimpin agama sebagai narasumber utama, SKH Republika tidak pernah melibatkan narasumber umat sebagai pembanding. Sehingga, harian ini dengan sengaja, intentional, menempatkan institusi agama sebagai lembaga sosial yang paling otoritatif membicarakan seksualitas.

b. Institusi Negara

Selain institusi agama, pihak yang mendapat otoritas membicarakan LGBT dalam publikasi SKH Republika adalah negara. Beberapa artikel menempatkan anggota DPR, polisi, menteri dan pemimpin daerah berikut ini.

*Deding Ishak, Komisi VIII DPR, LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa Dalam Pancasila dan UUD 1945 jelas bahwa pelaksanaan HAM tidak boleh bertentangan dengan norma, adar, dan nilai-nilai agama. Jika masalah LGBT ini telah bersinggungan dengan norma agama, harus dibahas mendalam.*

*Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye  
LGBT juga menjadi ancaman potensial bagi sistem hukum perkawinan di Indonesia yang tidak membenarkan perkawinan sesama jenis. Meski demikian, bukan berarti kita membenarkan dan membiarkan gerakan LGBT menggeser nilai-nilai agama dan kepribadian bangsa.*

Kedua narasumber di atas memberikan perhatian terhadap nilai moral bangsa. Keduanya mewakili negara karena jabatan publik yang diembannya. Keduanya menekankan bahwa penerapan HAM tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma dan adat yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada bagian atas tulisan ini, nilai nasionalisme dianggap lebih penting daripada universalisme.

*Irjen Tito Karnavian, Kapolri, Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye  
Kami mengimbau para LGBT tidak memprovokasi orang lain ikut kalangan mereka yang justru membuat orang tua resah.  
Karena itu, perlindungan pada mereka (LGBT) kita berikan. Mereka tidak boleh jadi korban kekerasan.*

*Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye*

*Kamu kalau mau gerakan, jangan kampanye enggak-enggak. Kalau masuk ranah publik, ada aturannya.*

Ada dua narasumber yang dikutip diatas yaitu Kapolri dan Pemimpin Daerah, keduanya merupakan representasi negara. Hal yang menarik, argumen mereka berkaitan dengan kehadiran LGBT di ruang publik. Keduanya tidak menampik kenyataan bahwa kelompok LGBT ada dan berkembang di Indonesia. Namun kehadiran kelompok tersebut sebaiknya dibatasi di ruang publik untuk menghindari keresahan di masyarakat.

Dapat dikatakan, kedua narasumber bersikap moderat dengan kelompok LGBT, mengakui keberadaannya tetapi membatasi penampilannya di ruang publik. Sikap ini cukup berbeda dengan para pemimpin agama dan politik yang dibahas sebelumnya. Kapolri dan Pemimpin Daerah memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas ruang publik.

Dalam artikel yang dimuat SKH Republika, penempatan narasumber negara tidak pernah dilengkapi dengan sudut pandang lain yaitu rakyat. Sehingga dapat disimpulkan surat kabar ini secara intensional menganggap bahwa negara lebih berhak membicarakan seksualitas dibandingkan rakyat terlebih pelaku LGBT.

#### c. Institusi Pendidikan

Selain institusi agama dan negara, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, kampus dan keluarga dianggap menjadi pihak yang berwenang membicarakan seksualitas. Para narasumber yang terdiri dari menteri (Menteri Pendidikan, Menteri Pemuda dan Olahraga), pemimpin organisasi kemasyarakatan, dan peneliti di universitas.

Terdapat dua sudut pandang yang berbeda diantara mereka. Kelompok pertama : Menteri dan Cendekiawan Islam berpendapat bahwa pendidikan seksualitas dijutukan untuk menghindarkan diri anak dan remaja dari perilaku LGBT. Perilaku ini dianggap merupakan akibat pergaulan sosial bukan genetik. Sebagaimana dijelaskan berikut ini.

*Andi Yulia Fariz, ICMI, ICMI : Jangan Kucilkan LGBT*

*Insya Allah pada kepengurusan ini ICMI akan mempunyai program konseling dan pendidikan bagi calon pengantin. Sebab, keluarga itu ketahanan utama suatu bangsa.*

*Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye*

*Selama ini tidak ada temuan propaganda atau kampanye LGBT di lingkungan sekolah. Menurut dia, kampanye melalui buku yang isinya kurang patut atau mesum juga belum ditemukan. Biasanya kalau yang ada seperti itu langsung ditarik.*

*Imam Nahrawi, Menpora, Bentengi Anak dan Pemuda*

*Dari keluarga saya kira. Membentenginya adalah bagaimana peran orang tua itu harus aktif, ujar Imam di Jakarta, Jum'at (5/2) malam. Menurut Imam, orang tua perlu berperan untuk membina anak dalam menyeleksi pergaulan, baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan.*

Ada dua poin yang menarik. Pertama, institusi pendidikan merupakan ranah publik oleh karena itu ruang itu harus steril dari pembicaraan mengenai LGBT. Kedua, keluarga adalah institusi pendidikan dalam pengertian ini adalah pengasuhan yang penting. Keluarga dapat dijadikan benteng untuk menghindarkan anak-anak dan remaja dari perilaku LGBT.

Sudut pandang kedua mengenai otoritas lembaga pendidikan terhadap isu LGBT diwakili oleh organisasi hukum dan universitas. Ada dua poin utama yang disampaikan. Pertama, kedua institusi ini memandang bahwa fenomena LGBT adalah perubahan jaman yang natural dan tidak dapat dihindarkan karena perubahan orientasi seksual ini. Jika isu ini tidak diteliti justru kontra produktif, berikut kutipannya.

*Yasmin, YLBHI, Bentengi Anak dan Pemuda*

*Homoseksualitas adalah sebuah fenomena yang natural, senatural orang kidal dan tidak kidal. Untuk masyarakat dengan pendidikan yang lebih maju, kata dia, perbedaan orientasi seksual bukan lagi sesuatu yang membingungkan.*

*LGBT tak Boleh Masuk Kampus, Sari Damar Ratri, Peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI*

*Dengan melarang isu seksualitas untuk dikaji dan diteliti, Menristek telah menutup peluang adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan hasil kajian bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.*

*Irwan Hidayana, Peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI, Program Lain Juga Didanai Asing*  
*Pendidikan seksual penting bagi anak-anak agar mereka tahu –selain hanya perbedaan fisik laki-laki dan perempuan- juga peranan mereka berdasarkan gender sesuai norma sosial masyarakat. Dana asing yang masuk di Indonesia bukan hanya terkait LGBT, namun banyak program pemerintah yang juga didanai dari asing, tujuannya untuk kesejahteraan dan peningkatan pengetahuan.*

Dari seluruh narasumber yang digunakan SKH Republika tentang isu LGBT hanya kelompok peneliti dari YLBHI dan Peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI yang menyatakan diri pro terhadap kelompok LGBT. Sikap pro ini dalam pengertian bahwa institusi pendidikan perlu mempelajari fenomena baru ini lalu membangun pengetahuan yang ilmiah untuk memahaminya.

Oleh redaksi para peneliti ditempatkan sebagai perwakilan dari kelompok LGBT. Metode ini sebenarnya mengandung bias, karena para peneliti itu bukanlah pelaku LGBT. Mereka adalah para peneliti yang keberadaannya mewakili, memperantarai kelompok LGBT eksis artinya merupakan kenyataan. Kelompok peneliti ini tidak dapat sepenuhnya mewakili kelompok LGBT karena memiliki kepentingan politik pengetahuan yang tidak dimiliki/diadari oleh pelaku LGBT. Mereka punya sudut pandang yang bisa jadi berbeda dengan pelaku LGBT. Disamping itu, mereka juga memiliki kepentingan ekonomi politik yang berbeda dengan kelompok yang diteliti, LGBT.

Di Indonesia ketiga institusi diatas : agama, negara dan pendidikan, adalah institusi yang sangat berkuasa menentukan pendisiplinan tubuh dalam hal ini adalah seksualitas. Kecenderungan ini persis sebagaimana dijelaskan oleh Michael Foucault (1977) mengenai kuasa dan seksualitas. Institusi tersebut mengatur bagaimana seksualitas ditampilkan yaitu urusan privat yang harus diatur penampilannya di ranah publik. Seks adalah kenikmatan individu yang diatur oleh institusi publik.

## **Kesimpulan**

SKH Republika menggunakan pendekatan representasi intentional. Redaksi telah memiliki intensi dalam pemberitaan LGBT yaitu menolak kecenderungan seksual non heteroseksual. Intensi ini ditunjukkan oleh pemilihan narasumber yang diwawancarai dalam berita dan penulis kolom opini.

Mayoritas aktor dalam publikasi SKH Republika adalah subyek heteroseksual yang memiliki afiliasi dengan kelompok Islam konservatif dan moderat. Mereka memiliki intensi yang serupa dengan redaksi SKH Republika yaitu menganggap LGBT adalah penyimpangan agama, hukum, psikologis.

Konsep Marxist mengenai ideologi menyebutkan bahwa kelompok yang memiliki alat produksi akan melakukan kontrol terhadap produksi dan sirkulasi pemaknaan ide-ide di dalam masyarakat. Melalui kepemilikan media, para pemilik media sebagai kelas dominan akan menawarkan ideologinya yang membuat dominasi dan penindasan sosial terlihat natural dan menyembunyikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebut dominasi ideologi (Hall, 1997: 348).

SKH Republika melakukan dominasi ideologi dalam pemberitaannya. Mereka dengan sengaja memilih aktor yang berafiliasi dengan organisasi yang serupa dengan ideologi mereka untuk menguasai ruang publik yaitu kolom publikasi di SKH Republika. Sementara itu, kelompok marjinal yang mereka serang dalam hal ini adalah kelompok LGBT tidak mendapatkan ruang baik dalam bentuk narasumber berita maupun penulis opini.

Ada dua representasi ideologi yang dimuat SKH Republika berkaitan dengan isu LGBT. Pertama, praktik LGBT dianggap bersumber dari ideologi liberalisme. Ideologi ini harus ditolak di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan agama. Kedua, praktik LGBT menyandarkan dirinya pada ideologi universalisme yang tidak dapat sepenuhnya diterima dalam konteks Indonesia karena ada banyak norma dan peraturan nasional yang bertentangan dengan nilai universal tersebut.

Selanjutnya, representasi seksualitas yang sengaja (intentional) ditempatkan SKH Republika. Ada dua representasi seksualitas yaitu pengetahuan dan institusi otoritatif.

Pertama, pengetahuan mengenai LGBT dipilih oleh redaksi mengikuti

pengetahuan bahwa LGBT terjadi karena pergaulan sosial bukan genetika. Kedua paham itu sebenarnya diperbincangkan di wilayah akademis dengan sangat mendalam tetapi pembaca dipilhkan salah satu sudut pandang pengetahuan.

Kedua, lembaga otoritatif yang boleh memperbincangkan LGBT adalah institusi agama, negara, dan pendidikan. Ketiga institusi ini merupakan institusi publik yang dianggap boleh memberikan penilaian terhadap praktik LGBT.

Institusi agama islam dipilhkan kelompok yang sepenuhnya menentang. Sikap ini sejalan dengan para aktor negara yang berafiliasi dengan Islam yaitu Menteri Agama dan anggota DPR dari Partai Islam. Birokrat pendidikan (Menteri Pendidikan dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, keduanya berasal dari kelompok islam) dan peneliti dari kelompok islam juga memiliki sikap yang sama menolak LGBT.

Institusi Pendidikan yang dianggap mendorong pengetahuan tentang LGBT adalah peneliti dari kampus sekuler dan advokat hukum Kebijakan redaksi dengan jelas menunjukkan bahwa institusi islam baik dari pemimpin, birokrat dan peneliti dengan tegas menolak praktik LGBT. Redaksi tidak memberikan celah penafsiran baru terhadap praktik LGBT dengan tidak menempatkan pelaku LGBT dalam diskusi mereka.

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**A. Anggaran Biaya**

Total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian ini adalah sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilaksanakan selama delapan bulan. Perincian biaya yang diusulkan adalah sebagai berikut.

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Komponen I: Honor peneliti & Nara sumber yg terlibat (maks	Rp 2.750.000,-
2	Komponen II: Peralatan Penunjang (5- 15%)	Rp 500.000,-
3	Komponen III: Bahan Habis Pakai (20- 30%)	Rp 3.500.000,-
4	Perjalanan (15 – 25%)	Rp 2.750.000,-
5	Komponen IV: Pengeluaran lain-lain (maks. 15 %)	Rp 500.000,-
	Jumlah	Rp 10.000.000,-

**B. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN**

No	Aktivitas	Bulan (2016)							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
1	Persiapan								
2	Mengumpulkan dokumen								

	koran Republika							
3	Mengidentifikasi wacana/artikel/berita yang relevan dengan tema penelitian							
4	Mengembangkan sistem kategorisasi wacana							
5	Analisis wacana kritis							
6	Pembuatan draft laporan							
8	Review dan penyelarasan akhir							
9	Seminar hasil, pelaporan, dan publikasi							

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, J. (2015). The major ideologies of liberalism, socialism and conservatism. *Political Studies*, 63(5), 980-994.
- Altman, D. 2001. "The Globalization of Sexual Identities." *Global Sex*. Chicago and London : University of Chicago Press.
- David T. Hill. 2010. *Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author*. London: Routledge.
- Dijk. Teun Van. 2001. *Critical Discourse Analysis*, dalam Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, dan Heidi E. Hamilton (ed). *The Handbook of Discourse Analysis*. Blackwell Publisher
- Edkin, J. & William, N.V., (ed.). 2009. *Critical Theories and International Relation*, Oxon: Routledge, diterjemahkan Teguh Wahyu Utomo. 2013, *Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esack, Farid. 1997. *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oxford: Oneworld.
- Fahmi, Muhammad, Irwan Abdullah, Ratna Noviani, Wening Udasmoro. 2015. "Diskursus Islam Dalam Konstruksi Media (Analisis Wacana Kritis Berita Kasus Charlie Hebdo Di Media Surakarta)" *LiNGUA* Vol. 10, No. 2, Desember. Hal. 55-64.
- Fairlough, N. 1989. *Language and Power*. London: Longman.
- Foucault, Michael. 1997. *Seks dan Kuasa: Sejarah Seksualitas*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Mills, Sara. 2003. *Michel Foucault*. London: Routledge.

Sipayung, Bambang A. 2009. "Teori Kritis Versus Hermeneutika: Debat Habermas dan Gadamer," *Majalah Filsafat Driyarkara*, Tahun XXIII No 1.

Supena, Ilyas. 2012. "Mujahid Versus Teroris". *Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012. hal.165-192.

Owoyemi, M. Y., & Sabri, A.Z.S.A. (2013). LGBT:nature or ideology: The view of a former LGBT Practitioner in Malaysia. *Research Journal of Biological Sciences*, 8(4), 104-111.

*Republika*, Ahad, 24 Januari 2016.

*Republika*, Sabtu, 13 Februari 2016.

*Republika*, Kamis, 3 Maret 2016.

[http://www.mahakamedia.com/about\\_us](http://www.mahakamedia.com/about_us)

<https://www.hrw.org/world-report/2013>

## *Curriculum Vitae*

### **Organisasi Tim Pelaksana**

#### **Ketua Tim Pelaksana:**

Nama dan Gelar Akademik : Dr. Suranto, MPd., M.Si.  
NIP : 196103061987021004  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1/IV-b  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Bidang Keahlian : Ilmu Komunikasi  
Fakultas/Program Studi : FIS / Ilmu Komunikasi  
Waktu yang disediakan : 6 jam/minggu

**Anggota 1** Nama dan Gelar Akademik : Benni Setiawan, MSI  
NIP : 198303292015041001  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.1/IIIB  
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar  
Bidang Keahlian : Agama dan Media  
Fakultas/Program Studi : FIS/Ilmu Komunikasi  
Waktu yang disediakan : 4 jam/minggu

**Anggota 2** Nama dan Gelar Akademik : Dyna Herlina S, M.Sc  
NIP : 198104212005012001  
Pangkat/Golongan : Penata TkI/IIIB  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Bidang Keahlian : Ilmu Komunikasi/Kajian Media  
Fakultas/Program Studi : FIS/Ilmu Komunikasi  
Waktu yang disediakan : 4 jam/minggu

**Anggota 3** Nama dan Gelar Akademik : Siti Machmiah., S.I.Kom., M.A  
NIP : 198805222015042002  
Pangkat/Golongan : Penata Muda TkI/IIIB  
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar  
Bidang Keahlian : Ilmu Komunikasi  
Fakultas/Program Studi : FIS/IlmuSosial  
Waktu yang disediakan : 4 jam/minggu

**Anggota 4** Nama : Desy Nurjanah  
NIM : 15419141024  
Prodi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial

**Anggota 5** Nama : Salt Masitoh  
NIM : 14419144010  
Prodi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial

## Artikel LGBT di Koran Republika

No	Tanggal	Judul	Reporter	Aktor	Institusi	Komentar	Pro/ Kontra	Perspektif
1	24/01/2016	<b>LGBT Ancaman Serius</b>	Dyah Ratna Meta Novia , Ahmad Islamy Jamil	Muhammad Nasir Djamil	DPR RI Partai Keadilan Sejahtera	"Ormas-ormas Islam diharapkan terus giat memberikan informasi dan penyadaran kepada masyarakat terkait permasalahan ini. Selain itu, juga harus proaktif berdialog dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam kelompok LGBT," "Semua pihak harus berperan, menguatkan satu sama lain dengan posisinya masing-masing,"	Kontra	- Agama  - Politik
2	24/01/2016	<b>LGBT Ancaman Serius</b>	Dyah Ratna Meta Novia , Ahmad Islamy Jamil	KH Ayip Abbas	Pondok Pesantren Buntet Cirebon	"Maraknya perilaku seksual menyimpang akibat salah satu dampak modernitas. Efek domino kebebasan nyeleneh yang diagungkan,"	Kontra	- Agama

						"Fungsi KPI formalitas saja, tayangan televisi makin rusak. Tantangan orang tua sekarang lebih berat,"		- Sosial  - Teknologi
3	24/01/2016	<b>LGBT Ancaman Serius</b>	Dyah Ratna Meta Novia , Ahmad Islamy Jamil	Siska (nama samaran)	Mantan LGBT	"Lesbi dan LGBT penyebarannya lebih cepat dari narkoba. Cek saja ke lapangan, hampir tiap hari ada lesbi baru,"	Negosiasi (Pro-Kontra)	- Remaja  - Pendidikan  - Kesehatan
4	24/01/2016	<b>LGBT Ancaman Serius</b>	Dyah Ratna Meta Novia , Ahmad Islamy Jamil	Amel (nama samara)	Mantan LGBT	"Sudah naik tingkat, remaja sekarang bukan free sex lagi, tapi jadi LGBT. Salah satunya, lesbi."	Negosiasi (Pro-Kontra)	- Remaja
5	24/01/2016	<b>LGBT Ancaman Serius</b>	Dyah Ratna Meta Novia , Ahmad Islamy Jamil	Ustadz Erick Yusuf	Tokoh Agama	"Semestinya orang-orang yang mempunyai orientasi seks yang salah tersebut diberi penyuluhan. Baik lewat agama maupun lewat kejiwaan dengan intensif,"	Kontra	- Agama  - kesehatan
6	24/01/2016	<b>LGBT Ancaman Serius</b>	Dyah Ratna Meta Novia , Ahmad Islamy Jamil	Mohammad Abduhzen	Pengamat pendidikan	Dalam sex education tersebut dijelaskan bagaimana nilai-nilai dan konsep kebudayaan yang kita anut,"	Kontra	- Pendidikan

						"Orang tua dan guru harus disadarkan keberadaan ancaman ini, termasuk para pembuat kebijakan,"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebudayaan</li> <li>- Parenting</li> <li>- Anak</li> <li>- Hukum</li> </ul>
7	25/01/2016	<b>Jangan Abai LGBT</b>				Kaum Muslim Indonesia tidak boleh abai terhadap aneka kampanye kelompok LGBT yang menyorot pada pelegalan LGBT di Tanah Air. Mengucilkan mereka dari pergaulan sosial memang kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi membiarkan mereka merusak pemahaman orang lain juga penyangkalan terhadap moralitas. Dan, sesungguhnya moralitas adalah substansi utama yang membuat kita layak disebut sebagai manusia.	Kontra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agama</li> <li>- Nasionalisme</li> <li>- Moral</li> <li>- Sosial</li> </ul>
8	26/01/2016	<b>LGBT tak Boleh</b>	Umi Nur Fadhilah,	M Nasir	Menristek Dikti	"Masa kampus untuk itu?"	Kontra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan</li> </ul>

		<b>Masuk Kampus</b>	Lintar Satria			Ada standar nilai dan standar susila yang harus dijaga. Kampus adalah penjaga moral,"		- Moral
9	26/01/2016	<b>LGBT tak Boleh Masuk Kampus</b>	Umi Nur Fadhilah, Lintar Satria	Mahfud MD	Pakar Hukum Tata Negara	"HAM tak selalu mutlak-universal. LGBT bertentangan dengan nilai ketuhanan, moralitas, dan budaya Indonesia. Pasal 28J (UUD),"	Kontra	- Hukum - HAM - Moral - Agama
10	26/01/2016	<b>LGBT tak Boleh Masuk Kampus</b>	Umi Nur Fadhilah, Lintar Satria	Sari Damar Ratri	Peneliti Puska Genseks Fisip UI	"Dengan melarang isu seksualitas untuk dikaji dan diteliti, Menristek telah menutup peluang adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan hasil kajian bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural,"	Pro	- Keilmuan - Pendidikan - Kesehatan - Masyarakat - Seksual
11	26/01/2016	<b>Program Lain Juga Didanai Asing</b>	Hasanul Rizqa	Irwan Hidayana	Peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI	Pendidikan seksual penting bagi anak-anak agar mereka tahu –selain hanya perbedaan fisik laki-laki dan perempuan- juga peranan mereka berdasarkan gender sesuai norma sosial	Negosiasi (Pro- Kontra)	- Kesehatan - Pendidikan - Seksualitas  - Sosial - Politik

						masyarakat. Dana asing yang masuk di Indonesia bukan hanya terkait LGBT, namun banyak program pemerintah yang juga didanai dari asing, tujuannya untuk kesejahteraan dan peningkatan pengetahuan.		
12	28/01/2016	<b>Perspektif HAM Perkawinan Sesama Jenis</b>	Maneger Nasution	Maneger Nasution	Komisioner Komnas HAM	Hak untuk menikah dan berkeluarga yang berhubungan dengan pernikahan sesama jenis masih termasuk wilayah abu-abu DUHAM PBB, sehingga mengikuti hukum nasional.	Kontra	- HAM  - Hukum - Keluarga
13	1/2/2016	<b>Mewaspada Virus LGBT</b>	Hasian Sidabutar	Hasian Sidabutar	Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia	Memang, LGBT itu bukan kejahatan, akan tetapi berpotensi menghasilkan kejahatan, seperti kekerasan seksual, penyebaran penyakit seksual, dan agresi terhadap nilai-nilai publik.	Kontra	- Hukum

						Negara tidak boleh melegalkan agresi terhadap moralitas dan nilai-nilai publik.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga</li> <li>- Moral</li> <li>- Sosial</li> </ul>
14	5/2/2016	<b>LGBT dalam Perspektif Hukum (Islam)</b>	Intan Mahabab Nabila	Intan Mahabab Nabila	Mahasiswa Fakultas Hukum UI,  Relawan pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM)	LGBT tidak dilegalkan di wilayah hukum Indonesia. Islam juga mengharamkan perilaku homoseks, ditunjukkan oleh kisah kaum Nabi Luth yang dilaknat karena perbuatannya	Kontra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agama</li> <li>- Hukum</li> </ul>
15	7/2/2016	<b>Bentengi Anak dan Pemuda</b>	Qommaria Rostanti, Rahmat faja Satria Kartika Yudha/Lintar Satria/antara,	Imam Nahrawi	Menpora	"Dari keluarga saya kira. Membentenginya adalah bagaimana peran orang tua itu harus aktif,"	Kontra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga</li> <li>- Anak</li> <li>- Remaja</li> <li>- Pendidikan</li> </ul>

								- Pengasuhan
16	7/2/2016	<b>Bentengi Anak dan Pemuda</b>	Qommaria Rostanti, Rahmat faja Satria Kartika Yudha/Lintar Satria/antara,	Abdul Kadir Karding	PKB	"Pernikahan sejenis itu dilarang dan menjadi prinsip bagi PKB,"  "Sudah kita tanya, sudah kita buka bukunya, memang itu perbuatan yang dilarang dan dilaknat oleh Allah,"	Kontra	- Agama  - Politik
17	7/2/2016	<b>Bentengi Anak dan Pemuda</b>	Qommaria Rostanti, Rahmat faja Satria Kartika Yudha/Lintar Satria/antara,	Jazuli Juwaini	PKS	"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."	Kontra	- Agama  - Hukum - Moral - Negara

18	7/2/2016	<b>Bentengi Anak dan Pemuda</b>	Qommaria Rostanti, Rahmat faja Satria Kartika Yudha/Lintar Satria/antara,	Yasmin	YLBHI	Homoseksualitas adalah sebuah fenomena yang natural, senatural orang kidal dan tidak kidal. Untuk masyarakat dengan pendidikan yang lebih maju, kata dia, perbedaan orientasi seksual bukan lagi sesuatu yang membingungkan.	Pro	- Norma Sosial  - Kebudayaan
19	7/2/2016	<b>Bentengi Anak dan Pemuda</b>	Qommaria Rostanti, Rahmat faja Satria Kartika Yudha/Lintar Satria/antara,	Agung Sugiarto	Layanan Peduli Sahabat	"Saya selalu bilang, 'lawan' kalian itu pemerintah, pemuka agama, dan kultur. Kalian hidup di mana? Kalau Indonesia anggap LGBT masih penyimpangan, ya berarti memang begitu adanya,"	Kontra	- Sosial  - Agama - Budaya
20	12/2/2016	<b>Ironi Penggiat LGBT</b>	Badrul Munir	Badrul Munir	Dokter HIV-AIDS RS Saiful Anwar	Penggiat LGBT jangan hanya mengedepankan asas	Kontra	- Agama

					Malang	kebebasan dan HAM, tetapi lihatlah dampak LGBT dan bertanggung jawablah apabila mereka para LGBT terinfeksi HIV-AIDS dengan ikut merawat dan menjaganya. Maka itu, baru "penggiat LGBT sejati" karena selama ini mereka hanya lempar batu sembunyi tangan.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasionalisme</li> <li>- Moral</li> <li>- Sosial</li> </ul>	
21	13/02/2016	<b>Politik Perang Gerakan LGBT</b>	ASRORUN SHOLEH	NIAM	ASRORUN NIAM SHOLEH	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Perang asimetris dan perang <i>proxy</i> muncul di Indonesia seiring adanya LGBT. Istilah LGBT sarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kampanye LGBT melalui media sosial ataupun pemeritaan media massa mempengaruhi opini publik menjadi lebih terbuka terhadap isu ini. Perang asimetris ini membuat paradigma terhadap kaum homoseksual dan transgender berubah.	Kontra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak</li> <li>- Komunikasi</li> <li>- Sosiologi</li> <li>- Kesehatan</li> <li>- HAM</li> <li>- Moral</li> </ul>

						Pergerakan aktivis LGBT ini dalam rangka mendapatkan hak-haknya agar sama dengan warga negara lain. LGBT melanggar hukum Indonesia dan berbahaya bagi tatanan sosial masyarakat. Selain itu, LGBT merupakan penyakit kejiwaan yang harus ditemukan obatnya. Anak-anak juga perlu mendapat perlindungan ekstra dari menjadi korban ataupun pelaku cinta sesama jenis ini. Untuk memerangi LGBT tidak hanya dengan		
22	16/02/2016	<b>Ada Tekanan Asing Soal LGBT</b>	Dessy Suciati Saputri/	Pribudiarta Nur	Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak	"Memang tekanannya cukup besar untuk menyusupkan ide LGBT ke dalam implementasinya, bukan undang-undang,"	Kontra	- Perempuan  - Anak
23	16/02/2016	<b>Ada Tekanan Asing Soal LGBT</b>	Dessy Suciati Saputri/	Pribudiarta Nur	Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak	"Kita baca di dalamnya ternyata ada LGBT, ada modus LGBT,"	Kontra	- Perempuan

								- Anak
24	16/02/2016	<b>Ada Tekanan Asing Soal LGBT</b>	Dessy Suciati Saputri/	Pribudiarta Nur	Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak	"Tetap saja, pegangan kami dua undang-undang itu. Pemerintah pasti taat undang-undang,"	Kontra	- Anak - Hukum  - Anak - Perempuan
25	16/02/2016	<b>Ada Tekanan Asing Soal LGBT</b>	Dessy Suciati Saputri/	Luhut Pandjaitan	Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	"Kita tidak pernah tunduk terhadap tekanan siapa pun. Kita ini selesaikan dengan cara kita,"	Kontra	- Politik   - Hukum  - Kedaulatan - Pertahanan - Keamanan
26	16/02/2016	<b>Ada Tekanan Asing Soal LGBT</b>	Dessy Suciati Saputri/	Jusuf Kalla	Wakil Presiden	"Secara formal (UNDP) tidak (berikan dana). Mungkin diberikan oleh LSM,"	Negosiasi (Pro-Kontra)	- Negara  - HAM - Hukum

27	16/02/2016	<b>LGBT dan Kembali Fitrah</b>	Mohamad Soleh	Mohamad Soleh	Founder and Master Trainer Smart Empowerment Technique (SET)	Pelaku LGBT "full" artinya sudah mendarah daging atau akut, maka harus diberikan beberapa treatment terapi sekaligus, yaitu terapi hormonal (melibatkan psikiater), terapi kognitif, terapi keluarga (family therapy), dan lebih afdal lagi dengan terapi spiritual juga. Sedangkan kategori kedua, "calon" LGBT, yaitu orang yang mulai tertarik atau ada kecenderungan LGBT, lebih mudah; cukup terapi kognitif, spiritual, dan terapi keluarga. Untuk mengembalikan diri ke fitrah, seseorang perlu mendengarkan hati nurani dan merenung dan berdialog kepada diri sendiri. Maka akan nampak yang baik dan yang buruk, nantinya segala keputusan tergantung diri sendiri yang menentukan yang paling cocok dan nyaman untuk dilaksanakan.	Kontra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesehatan</li> <li>- Agama</li> <li>- Psikologi</li> </ul>
----	------------	--------------------------------	---------------	---------------	--	---	--------	---

28	16/02/2016	<b>Membentengi Keluarga dari Pengaruh Gerakan LGBT</b>	Hepi Wahyuningsih	Hepi Wahyuningsih	Ahli Psikologi Keluarga Universitas Islam Indonesia (UII)	Kampanye LGBT dianggap berbahaya bagi anak-anak. Perilaku menyimpang tersebut dapat menjadikan anak menjadi korban atau bahkan pelaku. Orang tua seharusnya terus mendampingi pertumbuhan anak-anak mereka dan menjadikan keluarga menjadi tempat yang nyaman bagi perkembangan mereka. Hal tersebut dapat menghindarkan anak dari perilaku seksual yang menyimpang sebagai akibat dari masifnya media yang bermuatan konten berbau seks menyimpang.	Kontra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga</li> <li>- Moral</li> <li>- Anak</li> <li>- Hukum</li> <li>- Perempuan</li> <li>- Pengasuhan</li> </ul>
29	16/02/2016	<b>Pemerintah Bantah Terima Dana</b>	Hasanul Rizqa,  Christiyaningsih, Umi Nur Fadhilah	Sonny Manalu	Kemensos	"Tidak sama sekali dan tidak akan menerima itu (dana asing),"	Negosiasi (Pro-Kontra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosial</li> </ul>
30	16/02/2016	<b>Pemerintah Bantah Terima</b>	Hasanul Rizqa,	Sony Manalu	Kemensos	"Kan pemerintah tidak boleh mendiskriminasi, tak peduli	Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosial</li> </ul>

		<b>Dana</b>	Christiyaningsih, Umi Nur Fadhilah			orientasi (seksualnya),"	(Pro-Kontra)	- Pemerintah
31	16/02/2016	<b>Pemerintah Bantah Terima Dana</b>	Hasanul Rizqa, Christiyaningsih, Umi Nur Fadhilah	Sony Manalu	Kemensos	"Ke sanalah dana Rp 2,5 miliar tersalurkan dalam program-program rehabilitasi sosial,"	Negosiasi  (Pro-Kontra)	- Sosial  - Pemerintah
32	16/02/2016	<b>Pemerintah Bantah Terima Dana</b>	Hasanul Rizqa, Christiyaningsih, Umi Nur Fadhilah	Khofifah Indar Parawansa	Menteri Sosial	"Saya tidak melihat itu teranggarkan. Mungkin itu di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,"	Negosiasi  (Pro-Kontra)	- Sosial
33	16/02/2016	<b>Pemerintah Bantah Terima Dana</b>	Hasanul Rizqa, Christiyaningsih, Umi Nur Fadhilah	Bowo Sigit Prabowo	Komisi VIII DPR	"Artinya, ada orang-orang yang bermain untuk kelompok itu, orang pemerintah,"	Kontra	- Pemerintah
34	16/02/2016	<b>UNDP Perkuat Komunitas LGBT</b>	Hasanul Rizqa		UNDP	"Selain itu, agar LGBT memiliki akses hukum,"	Pro	- HAM  - Hukum

35	16/02/2016	<b>UNDP Perkuat Komunitas LGBT</b>	Hasanul Rizqa	Helen Clark	UNDP	"Sebanyak 19 persen dari seluruh transgender perempuan di dunia hidup dengan HIV. Potensi mereka terkena HIV mencapai 49 kali lebih tinggi dibandingkan semua perempuan dewasa yang ada pada usia reproduksi,"	Pro	- Kesehatan
35	16/02/2016	<b>UNDP Perkuat Komunitas LGBT</b>	Hasanul Rizqa	Oscar Primadi	Kementerian Kesehatan (Kemenkes)	"Salah satu solusinya ialah dengan berperilaku seks wajar,"	Kontra	- Kesehatan
37	16/02/2016	<b>UNDP Perkuat Komunitas LGBT</b>	Hasanul Rizqa	Haliq Siddiq	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	"Kalau di AS memang kasus HIV-AIDS banyaknya homoseksual, bukan lesbian. Tetapi, di Indonesia paling banyak di heteroseksual,"	Negosiasi (Pro-Kontra)	- Kesehatan
38	17/02/2016	<b>Kalau Diformalkan Jadi Problem</b>	Hasanul Rizqa	Maneger Nasution	Komnas HAM	Indonesia sebagai negara berkewajiban melindungi semua warga negara, termasuk LGBT. Namun jika LGBT meminta hak yang sama -untuk bisa menikah sesama jenis- maka negara tidak bisa, karena aturan di Undang-Undang sudah jelas.	Kontra	- HAM

						Norma agama juga tidak memperbolehkan.		- Hukum
39	17/02/2016	<b>Struktur Otak LGBT</b>	Ihshan Gumilar	Ihshan Gumilar	Peneliti Psikologi Saraf	LGBT merupakan penyakit psikologi yang sangat berpotensi mendatangkan penyakit-penyakit yang lain.	Kontra	- Kesehatan
40	18/02/2016	<b>Fitrah dan LGBT</b>	Aliah BP Hasan	Aliah BP Hasan	Bidang Kajian Ilmiah Asosiasi Psikologi Islam	Perilaku homoseksual bukan hasil pengaruh genetika karena mereka yang homoseksual tidak dapat meneruskan gennya kepada keturunannya. Faktor nongenetiklah yang menyebabkan gen organisme mengekspresikan dirinya secara berbeda. Secara ringkas, berbagai penelitian menunjukkan bagaimana kecairan identitas, perilaku, dan orientasi seksual. Pertama, heteroseksual hingga kini merupakan identitas orientasi seksual terbanyak dan paling tidak banyak berubah sepanjang waktu	Kontra	- Kesehatan  - Ilmiah

						<p>(Kinnish, Strassberg, &amp; Turner, 2005).</p> <p>Kedua, terdapat bukti bahwa orientasi seksual perempuan memiliki kecairan lebih besar dibandingkan pria, terutama pada orientasi seksual minoritas atau nonheteroseksual (Diamond, 2008; Dickson, Paul dan Herbison, 2003)</p> <p>Ketiga, identitas biseksual cenderung paling kurang konsisten dibandingkan identitas seksual lainnya (Kinnish dan kawan-kawan, 2005).</p>		
41	18/02/2016	<b>Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye</b>	Dyah Ratna Meta Novia/ Wilda Fizriyani, Dessy Suciati Saputri,c30,c33,antara	Irjen Tito Karnavian	Polri	"Kami mengimbau para LGBT tidak memprovokasi orang lain ikut kalangan mereka yang justru membuat orang tua resah,"	Kontra	- Hukum

						"Karena itu, perlindungan kepada mereka kita berikan. Mereka tidak boleh menjadi korban kekerasan,"		- Masyarakat  - Sosial
42	18/02/2016	<b>Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye</b>	Dyah Ratna Meta Novia/ Wilda Fizriyani, Dessy Suciati Saputri,c30,c33,antara	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama	"LGBT juga menjadi ancaman potensial bagi sistem hukum perkawinan di Indonesia yang tidak membenarkan perkawinan sesama jenis," "Meski demikian, bukan berarti kita membenarkan dan membiarkan gerakan LGBT menggeser nilai nilai agama dan kepribadian bangsa,"	Kontra	- Hukum  - Keluarga  - Agama
43	18/02/2016	<b>Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye</b>	Dyah Ratna Meta Novia/ Wilda Fizriyani, Dessy Suciati Saputri,c30,c33,antara	Basuki Tjahaja Purnama	Gubernur DKI Jakarta	"Kamu kalau mau gerakan, jangan kampanye enggak- enggak. Kalau masuk ranah publik, ada aturannya,"	Kontra	- Hukum  - Masyarakat

44	18/02/2016	<b>Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye</b>	Dyah Ratna Meta Novia/ Wilda Fizriyani, Dessy Suciati Saputri,c30,c33,antara	Anies Baswedan	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	"Biasanya kalau yang ada seperti itu langsung ditarik."	Kontra	- Pendidikan
45	18/02/2016	<b>Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye</b>	Dyah Ratna Meta Novia/ Wilda Fizriyani, Dessy Suciati Saputri,c30,c33,antara	Arist Merdeka Sirait	Komnas Perlindungan Anak	"Bahkan saat saya tanya apakah ada yang tak pernah lihat film porno, mereka tak ada yang berani tunjuk tangan." "Makanya jangan sampai LGBT ini didukung dan dilegalkan,"	Kontra	- Pendidikan  - Remaja  - Anak
46	18/02/2016	<b>Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye</b>	Dyah Ratna Meta Novia/ Wilda Fizriyani, Dessy Suciati Saputri,c30,c33,antara	Atifah Thaha	Ketua Pengurus Pusat Wanita Islam	"Rekomendasi kami adalah semua pihak mendekati yang kita duga ada sedikit penyimpangan itu, mulai didekati, dijelaskan bahwa itu adalah suatu kelainan yang bisa diobati,"	Kontra	- Perempuan    - Kesehatan

47	19/02/2016	<b>Majelis Agama Tolak LGBT</b>	Dian Fath Risalah, Retno Wulandhari	Nazamudin Ramli	MUI	"Aktivitas LGBT sudah sangat meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap tatanan sosial bangsa Indonesia," "Waspada pula gerakan atau intervensi dari pihak mana pun yang berdalih HAM dan demokrasi untuk mendukung perkembangan LGBT,"	Kontra	- Agama  - Sosial  - HAM - Demokrasi - Politik - Kesehatan
48	19/02/2016	<b>Majelis Agama Tolak LGBT</b>	Dian Fath Risalah, Retno Wulandhari	Romo Paulus Christian Siswantoko	Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)	"Artinya, pemerintah harus mampu melindungi pelaku LGBT sambil membantu mereka untuk sembuh,"	Kontra	- Agama  - Kesehatan - Sosial
49	19/02/2016	<b>Majelis Agama Tolak LGBT</b>	Dian Fath Risalah, Retno Wulandhari	Asrorun Niam Sholeh	KPAI	"Merangkul Korban, Menolak Legalisasi LGBT"  "Dengan demikian, pelaku LGBT harus direhab. Bila	Kontra	- Anak  - Hukum

						mereka tak mau, bisa dikenakan tindak pidana,"		- Etika - Kesehatan
50	20/02/2016	<b>ICMI: Jangan Kucilkan LGBT</b>	Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah	Andi Yulia Fariz	ICMI	"jangan dikucilkan, apalagi ada kekerasan. Karena apapun itu, mereka juga anak bangsa."	Kontra	- Perempuan  - Anak - Remaja - Keluarga
51	20/02/2016	<b>ICMI: Jangan Kucilkan LGBT</b>	Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah	Sri Astuti Buchari	ICMI	"Ini (LGBT) sesuatu yang harus ditolong dan diatasi bersama, tapi bukan dengan kekerasan," "Caranya mungkin kita bisa undang psikolog atau psikiater untuk penyembuhan mereka,"	Kontra	Kesehatan
52	20/02/2016	<b>ICMI: Jangan Kucilkan LGBT</b>	Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah	Andi Yulia Fariz	ICMI	"Insya Allah pada kepengurusan ini ICMI akan mempunyai program konseling dan pendidikan bagi calon pengantin. Sebab, keluarga itu ketahanan utama suatu bangsa,"	Kontra	- Keluarga

								- Anak
53	20/02/2016	<b>ICMI: Jangan Kucilkan LGBT</b>	Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah	Badrodin Haiti	Polri	"Masyarakat mengharapkan mereka tidak mempropagandakan LGBT. Tetapi, keberadaannya kita hormati,"	Negosiasi (Pro-Kontra)	Masyarakat
54	20/02/2016	<b>ICMI: Jangan Kucilkan LGBT</b>	Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah	Badrodin Haiti	Polri	"Kalau melanggar hukum, kita tindak. Ada <i>kok</i> yang sudah kami proses,"	Negosiasi (Pro-Kontra)	Hukum
55	20/02/2016	<b>ICMI: Jangan Kucilkan LGBT</b>	Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah	Pribudiarta Nur Sitepu	KPPPA	"Karena anak itu putih bersih dan tidak ada kecenderungan kesana. Kecenderungan dibentuk dari lingkungan,"	Kontra	- Anak  - Kajian Keilmuan
56	20/02/2016	<b>ICMI: Jangan Kucilkan LGBT</b>	Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah	Pribudiarta Nur Sitepu	KPPPA	"Mereka <u>hanya</u> menginginkan agar dapat mengakses hak-haknya tanpa ada kekerasan,"	Negosiasi (pro-Kontra)	- HAM  - Kajian Keilmuan
57	20/02/2016	<b>ICMI: Jangan Kucilkan LGBT</b>	Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah	Hamid Muhammad	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan	"Konsepnya masih digodok. Nanti kalau sudah final kita infokan,"	Negosiasi (Pro-Kontra)	- Anak

					Menengah			- Keilmuan (kajian)
58	20/02/2016	<b>Tajuk Melindungi Anak-Anak Kita</b>		Asrorun Niam Sholeh	KPAI	Perilaku homoseksual dan aktivitas menyimpang jika dibiarkan berkembang cenderung akan memangsa korban dan kelompok yang paling rentan adalah anak-anak.	Kontra	- Anak
59	20/02/2016	<b>Tajuk Melindungi Anak-Anak Kita</b>		Arist Merdeka Sirait	Komnas PA	di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam kejahatan seksual tidak dikenal suka sama suka. Anak-anak adalah korban.	Kontra	- Anak  - Hukum
60	20/02/2016	<b>Transformasi Diri LGBT</b>	Subandi	Subandi	Asosiasi Psikologi Islam	LGBT merupakan suatu penyakit psikologis yang perlu ditangani. Dalam	Kontra	- Kesehatan

						menangani kaus psikologis bagi para LGBT perlu adanya pendampingan, bukan hanya pendampingan psikologis semata namun perlu pendampingan secara spiritual dan rohaniah. Dalam perspektif psikologi Islam sebuah transformasi kehidupan menjadi lebih baik jika ada sebuah penyesalan yang nantinya akan membawa seseorang untuk taubat dan kemali ke jalan Allah SWT.		- Psikologi	
								- Agama	
61	21/02/2016	<b>LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa</b>	Ratna Tejomukti, Fizriyani	Ajeng Wilda	Dr Danardi Sosrosuhardjo SpKJ(K)	Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI)	"PDSKJI mendukung upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi ODMK dan ODGJ melalui upaya kesehatan jiwa dengan memberi pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hak asasi manusia (HAM),"	Kontra	- Kesehatan

									- Psikologis
62	21/02/2016	<b>LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa</b>	Ratna Tejomukti, Fizriyani	Ajeng Wilda	Dr Danardi Sosrosuhardjo SpKJ(K)	Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI)	"Mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III, orang dengan homoseksual dan biseksual masuk dalam kategori ODMK,"	Kontra	- Kesehatan  - Hukum
63	21/02/2016	<b>LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa</b>	Ratna Tejomukti, Fizriyani	Ajeng Wilda	Prof Subandi	Asosiasi Psikologi Islam, Himpunan Psikologi Indonesia (API-Himpsi)	"Temuan ilmiah terkini menunjukkan bahwa perilaku LGBT lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan orientasi seksual bersifat cair yang memungkinkan perilaku ini dapat di ubah,"	Kontra	- Kesehatan  - Agama - Psikologi

64	21/02/2016	<b>LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa</b>	Ratna Tejomukti, Fizriyani	Ajeng Wilda	Hartoyo	Aktivis LGBT	"Kami menuntut agar adanya penghapusan diskriminasi seksual dan identitas gender, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlakuan khusus," "Pemerintah ada memberikan bantuan, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dari asing juga. Jika ada atas nama LGBT oleh pemerintah disetop, bantuan untuk kami tidak diperpanjang,"	Pro	- HAM
65	21/02/2016	<b>LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa</b>	Ratna Tejomukti, Fizriyani	Ajeng Wilda	Deding Ishak	Komisi VIII DPR	Dalam Pancasila dan UUD 1945 jelas bahwa pelaksanaan HAM tidak boleh bertentangan dengan norma, adat, dan nilai-nilai agama. Jika masalah LGBT ini telah bersinggungan dengan norma agama, harus dibahas mendalam.	Kontra	- Agama  - Negara - Hukum - HAM







									- Hukum - Anak	
70	21/03/2016	<b>Langkah Sunyi Membungkam LGBT</b>	Asrorun Sholeh	Niam	Asrorun Sholeh	Niam	<i>Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia</i>	Setelah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendeklarasikan gerakan LGBT sebagai bagian proxy war, isu tentang LGBT di Tanah Air bisa dikatakan cenderung turun. LGBT terutama mengancam anak-anak, maka dari itu KPAI memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi mereka. Secara umum ada dua yang harus dilakukan dalam upaya langkah sunyi, yakni rehabilitasi dan roadmap regulasi.	Kontra	- Anak  - Pertahanan - Hukum - Kesehatan

Periode : Januari 2016-Maret 2016

Jumlah Artikel : 29 Artikel

Artikel Opini sebanyak 16 artikel

Artikel Reportase sebanyak 12 artikel

Kemunculan organisasi Islam non-pemerintah sebanyak 16 kali; organisasi pemerintah 32 kali, pendukung & pro LGBT sebanyak 3 kali, pakar hukum 1 kali, peneliti 3 kali, medis/kesehatan sebanyak 6 kali, tokoh agama non-Islam 1 kali, organisasi masyarakat 6 kali pengamat 1 kali dan 1 artikel tidak memunculkan nama penulis atau tokoh.

Perspektif yang digunakan : Agama =19, Hukum= 22, Kesehatan= 23, anak/remaja/perempuan =22, keluarga=11, pemerintah=11, sosbud=21, tekkom=2, pendidikan=8, pengetahuan/keilmuan=5, moral=8, HAM=9